

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TESIS



Oleh

ERNITA BANGUN

NPM. 041801018

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2006**

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP) Pada Program
Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area



Oleh

ERNITA BANGUN

NPM. 041801018

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2006**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan E-Government Pada Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara
N a m a : Ernita Bangun
N I M : 041801018

Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Kariono, MA

Pembimbing II



Drs. Humaizi, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

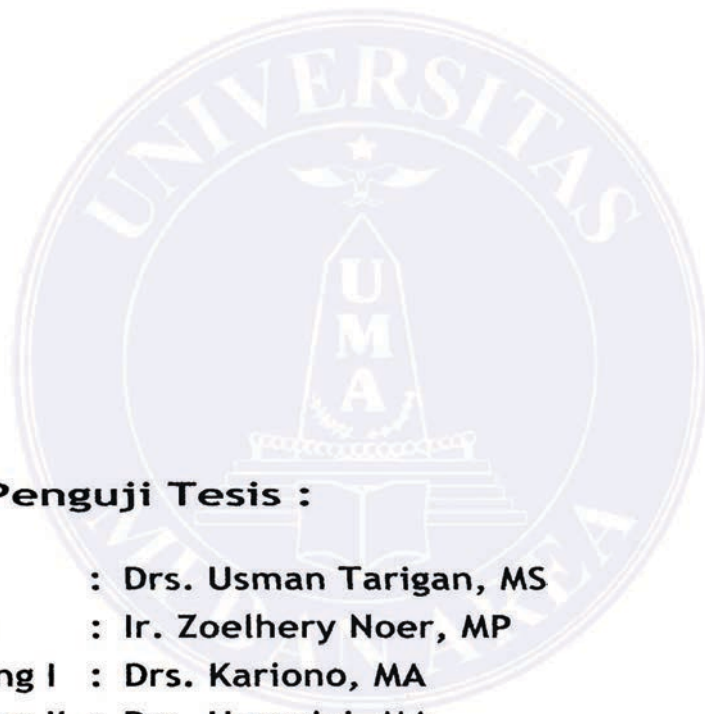


Drs. Kariono, MA

Direktur

Drs. Heri Kusmanto, MA

Telah diuji pada Tanggal 24 Agustus 2006



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS
Sekretaris : Ir. Zoelhery Noer, MP
Pembimbing I : Drs. Kariono, MA
Pembimbing II : Drs. Humaizi, MA
Penguji Tamu : Drs. Heri Kusmanto, MA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

N a m a : Ernita Bangun
N I M : 041801018
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Drs. Kariono, MA
Pembimbing II : Drs. Humaizi, MA

Dalam rangka memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan E-Government pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampel diambil secara *purposive sampling*, sebanyak 63 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif guna mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan E-Government pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dilihat dari indikator input, proses, output dan outcomes kebijakan e-government, belum berjalan dengan baik. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan e-government berupa hambatan secara internal pemerintah (good will, sumberdana dan teknologi) yang masih kurang. Sedang secara eksternal berupa masih belum siapnya budaya masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi dalam e-government.

Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan E-Government pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, perlu adanya political will dari Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Gubernur dan DPRD), dalam bentuk :

- a) Dukungan kepemimpinan politik yang memiliki komitmen berkelanjutan
- b) Menyediakan alokasi dana yang telah dianggarkan dan siap untuk dicairkan
- c) Kesepakatan melakukan koordinasi lintas sektoral
- d) Kesiapan dari seluruh SDM pemerintah daerah untuk belajar dan mengubah cara kerjanya sesuai dengan transformasi yang diinginkan
- e) Usaha untuk mensistemkan atau menginstitutionalkan konsep e-government agar langsung terus menerus (memiliki sustainability yang tinggi).

Key words : *Implementasi Kebijakan, e-government.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “Implementasi Kebijakan E-Government pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H. M. Yakub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Magister Administrasi Publik,
3. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi MAP, sekaligus sebagai Pembimbing I
4. Bapak Drs.Humaizi, MA, sebagai Pembimbing II
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

Terimakasih pula kepada kedua orang tua, Suami Tercinta dan keluarga, senantiasa memberi dorongan dengan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlimpat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Medan, Agustus 2006

Penulis

Ernita Bangun



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	6
2.2. Implementasi Kebijakan	17
2.3. E-Government	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Bentuk Penelitian	37
3.2. Populasi Sasaran	37
3.3. Rencana Sample	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data	38
3.5. Operasionalisasi Variabel	39
3.6. Teknik Analisis Data	40

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Propinsi Sumatera Utara	41
4.2. Struktur Organisasi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara	48
4.3. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Propinsi.....	49
4.4. Situasi Kepegawaian di Pemerintah Propinsi Sumatera Utara	51

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

5.1. Penyajian Data	54
5.2. Karakteristik Responden	54
5.3. Variabel Penelitian	57
5.4. Hambatan-hambatan	73
5.5. Peluang pengembangan E-Government.....	75

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	80
6.2. Saran - Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Unit Kerja dan Golongan.	52
4.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Berdasarkan Eselon.....	53
5.1	Distribusi Responden Menurut Umur.....	54
5.2	Distribusi Responden Menurut Kedudukan dalam program	55
5.3	Distribusi Responden Menurut Pendidikan	55
5.4	Distribusi Responden Menurut Kedudukan dalam Program.....	56
5.5	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Manusia dalam Implementasi E-Government.....	58
5.6	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Teknologi dalam Implementasi E-Government.....	59
5.7	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Keuangan dalam Implementasi E-Government.....	60
5.8	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Sarana dan Prasarana dalam Implementasi E-Government.....	61
5.9	Pendapat Responden Tentang Komunikasi dan Koordinasi antara Instansi terkait dalam implementasi e-government.....	62

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.

Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi pada lingkungan kehidupan antar bangsa yang semakin terbuka, dimana nilai-nilai universal di bidang ekonomi dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup saling berkaitan secara kompleks. Apa yang dilaksanakan tidak akan lepas dari pengamatan masyarakat internasional. Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah. Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi

pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidapmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Perubahan - perubahan di atas menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu: masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif dan masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain meliputi: selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis, dan perlu ditanggapi secara cepat. Oleh karena itu di masa mendatang pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 1976, *Public Policy Making*, New York, Holt Rinechart and Winston.
- Dunn, William N, 1994, *Public Policy Analysis; An Introduction*, Englewood Clifs, New Jeresy, Prenticel-Hall Inc, Indonesian Edition: Pengantar analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- City of Los Angeles, 2000. *Final E-Government Strategy* Report, E-Government Services Project by Price Waterhouse Coopers, January .
- Departemen of the Environment, Transport ang the Regions, 2001. *E-Government: Delivering Local Government Online-Milestones and Resources for the 2005 Target*, Eland House, Bressenden, Place, London,.
- Easton, David, 1965. *A Framework for Political Analysis*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congresional Quarter Press.
- International Consortium on Governmental Financial Management, 2001. *The Impact of E-Government on Financial Management: Corruption Risks and control rewards-Proceedings of Fifteenth Annual International Financial Management Conference*, Miami Florida, April
- Gibson, James L. 1990. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: GunungAgung.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasiaonal Pengembangan E- Government.
- Indrajit, Richardus Eko, 2004. *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknolpogi Digital*. Yogyakarta : Andi.
- Indrajit, R Eko, Dudi Rudianto & Akbar Zainuddin, 2005. *e - Government In Action : Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta : Andi.

- Irfan Islamy, 1991, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara,.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasasmita, Ginanjar (1995) *Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sebuah Tinjauan Mengenai Lingkungan Kebijaksanaan (Policy Environment)*, LAN bekerjasama dengan UNPAD, Bandung.
- Kristiadi, J.B, 1997. *Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21*, UNPAD, Bandung.
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier. 1981. *Effective Policy Implementation*. Toronto: D.C. Heath.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mustopadidjaja, AR, 1992, *Studi Kebijaksanaan: Perkembangan dan Penerapannya Dalam Rangka Administrasi dan Pembangunan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
-, 1999, *Manajemen Proses Kebijaksanaan*, Jakarta Lembaga Administrasi negara-Republik Indonesia
- Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 555/ 2854/K Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Telematika Propinsi Sumatera Utara.
- Soetopo, 1999, *Kebijaksanaan Publik dan Implementasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi negara - Republik Indonesia.
- Senge, Peter M. (1990) *The Fifth Discipline: The Art and Practic of The Learning Organization*, Doubleday Dell Publishing Group.
- Sugiyono, 1998. *Metode Penelitian Adminiistrasi*, Bandung : Alfabeta.
- The Conclil for Excellence in Government, *E-Government The Nex American Revolution*, Intergovernmental Technology Consortium, 2000.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2002. *Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta : Kerjasama YPAPI dengan Lukman Ofset.
- United Kongdom Cabinet Office, 2000. *Electronic Government Services for the 21st Century*, September.

- United State Government Working Group, 2000. ***Leadership for the New Millenium-Delivering on Digital Progress and Prosperity***-the 3rd Annual Report, Kanter, Rosabeth M, (1995 Word Class, Simon & Schuster Inc).
- Wahab, Solichin Abdul, 1990. ***Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara***, Malang: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra, 1994. ***Evaluasi Kebijakan Publik***. Jakarta : Raja Grafindo Persada, California Franchise Tax Board, ***E-Government Blueprint***, Califormat Franchise Board Members, September 2000.
- Washington State Digital Government, 2000. ***Turning Government to Face the People***-Release 2,

